

Sejarah Kriminalitas Ibukota Jakarta 1980-1990 dalam Media Massa

Fajar Kurniawan¹, RR.Roosita Cindrakasih²,
Dwi Mulyatari¹, Abdurakhman¹

¹⁾ Universitas Indonesia, Indonesia

²⁾ Universitas Bina Sarana Informatika

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi kriminalitas yang terjadi di Ibukota Jakarta pada tahun 1980 sampai 1990 yang diberitakan media massa koran *Pos Kota*. Kajian tentang Kriminalitas yang terjadi di Jakarta dilakukan dikarenakan banyaknya keberadaan para preman atau bandit, yang dari sudut pandang historiografi bahwa para bandit juga meresahkan kota-kota lainnya bahkan di pedesaan sekalipun di Indonesia terutama di wilayah Jawa Tengah. Tingkat keresahan warga atas preman dan bandit juga sangat tinggi, sehingga hal tersebut membuat pemerintahan Orde Baru pada saat itu juga mengambil langkah yang sangat serius dan tegas dalam membasmi preman-preman atau bandit di Indonesia. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode sejarah yang menekankan pada sumber-sumber kepustakaan. Hasil yang ditemui dalam penelitian ini adalah Jakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat kriminalitas yang tinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kemiskinan, kesenjangan sosial, dan korupsi. Media massa seperti Kompas, *Pos Kota* bahkan Majalah Tempo memainkan peran penting dalam mengangkat isu kriminalitas di Jakarta. Surat kabar ini sering kali memberikan liputan yang mendalam dan komprehensif tentang berbagai kasus kriminal, termasuk kasus-kasus yang melibatkan pejabat pemerintah.

History of Crime in the Capital City of Jakarta 1980-1990 in the Mass Media

Abstract

This article explores the crime that occurred in the capital city of Jakarta from 1980 to 1990, which was reported by the mass media *Pos Kota* newspaper. The study of crime in Jakarta was conducted because of the large number of thugs or bandits, which, from a histographic perspective, disturb other cities and even rural areas in Indonesia, especially in Central Java. The level of public unrest over thugs and bandits was also very high so this made the New Order government at that time also take very serious and firm steps in eradicating thugs or bandits in Indonesia. The method used in this article is historical, emphasizing the literature sources. The results of this study show that Jakarta is one of the cities with the highest crime rate in Indonesia. Various factors, including poverty, social inequality, and corruption cause this. Mass media such as Kompas, *Pos Kota*, and even Tempo Magazine play an important role in raising the issue of crime in Jakarta. This newspaper often provides in-depth and comprehensive coverage of various criminal cases, including cases involving government officials.

Kata Kunci

Jakarta,
Kriminalitas,
Pos Kota,
Orde Baru,
Bandit

Keywords

Jakarta, Crime, *Pos Kota*, New Order, Bandit

Pendahuluan

Kawasan perkotaan sering dianggap sebagai pusat peluang yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, pusat keragaman dan perubahan. Di daerah perkotaan, penduduk tinggal, bekerja, dan berinteraksi dalam lingkungan fisik terbatas mereka (Ghani, 2017). Perkembangan perkotaan tidak selalu paralel dengan terciptanya kesejahteraan, kenyamanan, dan keamanan penduduknya. Sebaliknya, pesatnya pembangunan ibukota juga sarat dengan berbagai permasalahan yang penduduknya, seperti kemiskinan, pengangguran, dan tingginya angka kriminalitas (kejahatan). Maraknya kejahatan di daerah perkotaan menjadikannya sebagai ruang ketakutan bagi banyak orang dan ketakutan itu tidak terbatas pada usia, kelas, jenis kelamin atau ras seseorang.

Masalah kriminalitas sebagai suatu kenyataan sosial tidak berdiri sendiri. Tetapi berkaitan dengan masalah sosial ekonomi, politik dan budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam literatur kriminologi, terdapat tiga perspektif pokok yang digunakan dalam menganalisis kejahatan yaitu: Pertama, perspektif yang mencari sebab kejahatan pada diri individu pelaku kejahatan, dengan menganalisis aspek biologis dan psikologisnya. Perspektif ini mengembangkan asumsi-asumsi dasar mengenai perbedaan antara penjahat dengan yang bukan penjahat, dan berupaya menemukan ciri-ciri khusus pelaku kejahatan pada perspektif "koreksional" tentang kejahatan (Marzuki, 1991).

Kedua, perspektif yang lebih memperluas wawasan mengenai penyebab kejahatan pada kondisi-kondisi yang "menghasilkan" penjahat. Asumsi dasarnya adalah, bahwa kejahatan merupakan produk sistem sosial sehingga dikembangkan teori-teori yang memusatkan perhatian pada struktur kesempatan yang berbeda-beda (*differenti opportunity structure*), kemiskinan, fasisme dan lain-lain. Kausa kriminalitas ditelusuri pula di lingkungan keluarga, kelompok pergaulan, dan lingkungan setempat, dengan asumsi bahwa kondisi lingkungan yang patologis dipandang sebagai faktor situasional timbulnya kejahatan. Ketiga, perspektif yang melihat sifat politis dari kejahatan, dalam pengertian bahwa kejahatan adalah gejala di dalam masyarakat yang tidak terlepas dari konflik-konflik, kekuasaan-kekuasaan dan kepentingan-kepentingan, yang mencakup juga pelanggaran nilai-nilai dan norma-norma kemanusiaan dan keadilan. Melalui perspektif ketiga ini lalu dikembangkan paradigma yang menggariskan bahwa golongan-golongan dominan dalam masyarakat yang memiliki dan mengendalikan berbagai sumber daya sosial, ekonomi dan politik mengriminalisasikan perilaku-perilaku yang dianggap mengancam tatanan yang ada, sehingga perumusan tentang kejahatan ditentukan oleh perubahan-perubahan struktur sosial, perkembangan kepentingan-kepentingan golongan serta peningkatan hasrat untuk melindungi golongan tersebut.

Kejahatan dalam terminologi yuridis adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Iri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut: (1) suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, Di samping itu juga harus ada niat jahat; (2) merupakan pelanggaran hukum pidana; (c) dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum; dan (d) diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran (Zaidan, 2016).

Menurut Sutherland (dalam Zaidan, 2016), kejahatan adalah suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan terhadapnya, negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang

sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial (Adang, 2010).

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain (Nassarudin, 2016).

Dambazau seperti dikutip Ghani (2017) mengklasifikasikan kejahatan menjadi empat kategori: kejahatan terhadap orang, kejahatan terhadap properti, kejahatan terhadap otoritas yang sah dan kejahatan terhadap tindakan lokal. Kejahatan terhadap orang di antaranya adalah pembunuhan, percobaan pembunuhan, bunuh diri, luka atau luka yang parah, penyerangan, pencurian anak, perdagangan budak, pemerkosaan, penyerangan, penculikan, pelanggaran yang tidak wajar dan lain-lain. Kejahatan terhadap harta benda: perampokan bersenjata, pencurian atau pencurian, perampokan, pembakaran dan lain-lain. Kejahatan terhadap otoritas yang sah: pemalsuan uang kertas, perjudian, pelanggaran perdamaian, sumpah palsu, penyusunan dan korupsi, melarikan diri dari tahanan dan kejahatan lainnya. Kejahatan terhadap tindakan lokal meliputi: pelanggaran lalu lintas, pelanggaran kota, pelanggaran minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan kejahatan lainnya.

Jakarta sebagai ibukota Negara Indonesia memiliki catatan sejarah kriminalitas yang tinggi pada era tahun 1980 hingga 1990. Berbagai bentuk tindak kejahatan terjadi di ibukota seperti pencurian, perampokan, penipuan, perampasan, penganiayaan, dan sebagainya. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, seperti yang dituliskan dalam koran harian *Pos Kota*, jumlah kasus pencurian yang dilaporkan pada tahun 1980 mencapai 7.559 kasus, perampokan (pencurian dengan kekerasan) sebanyak 2685 kasus, penipuan 3.504 kasus, penganiayaan berat 2.315 kasus, penggelapan 2.338 kasus dan perampasan 765 kasus. Pada tahun 1981 kasus pencurian di Jakarta naik sangat tajam mencapai 19.604 kasus. Kasus perampokan juga meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 4.532 kasus. Kasus penipuan, penganiayaan berat, penggelapan, dan perampasan juga meningkat pada tahun 1981 dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, kasus pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, penganiayaan berat dan ringan jumlahnya sangat tinggi setiap tahunnya.

Tabel 1 Kasus Kejahatan di Jakarta Tahun 1980 – 1987

Jenis Kejahatan	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Penganiayaan Berat	2.315	2.373	2.477	1.736	2.068	1.664	1.537	1.925
Penganiayaan Ringan	2.662	2.848	2.916	2.801	278	2.573	2.238	4.326
Penculikan	62	101	51	106	67	86	98	97
Pembunuhan	123	151	128	120	130	91	106	142
Pemerasan	765	868	837	719	443	443	386	529
Pencurian	7.559	19.604	1.952	9.096	8.951	10.141	9.637	8.951

Jenis Kejahatan	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Perampokan	3.685	4.532	6.724	9.230	3.638	2.632	1.455	4.235
Penipuan	3.504	3.169	3.519	3.112	3.491	4.051	3.045	3.491
Penggelapan	2.338	1.983	2.123	1.993	2.055	2.217	1.839	2.035
Penadahan		46	38	87	78	11	16	
	58							

Sumber: Koran *Pos Kota* - Data BPS DKI Jakarta, Diolah

Berdasarkan penelitian Sriasih dan Trilaksana (2014), Perkembangan kriminalitas di Jakarta pada tahun 1974-1983 terpusat di daerah-daerah tertentu. Tipe kejahatan yang terjadi pada waktu itu terutama penodongan, pencopetan dan penjambretan memiliki angka tinggi. Tindak kejahatan banyak terjadi di area publik seperti terminal, stasiun serta pasar. Antar wilayah kota madya satu dengan kota madya lain memiliki daerah-daerah tertentu yang rawan terhadap tindak kejahatan. Daerah yang rawan tindak kejahatan di Jakarta Pusat seperti di Pasar Baru, Senen, Kramat, Tanah Tinggi dan daerah sekitarnya.

Sriasih dan Trilaksana (2014) menyebutkan bahwa tempat-tempat yang rawan terhadap tindak kejahatan seperti pelabuhan, perempatan, angkutan umum, terminal, kawasan perdagangan (pasar, *mall*). Di Jakarta kawasan pelabuhan yang rawan terhadap tindak kejahatan adalah pelabuhan Tanjung Priok. Daerah Pelabuhan Tanjung Priok rawan terjadi pencurian terhadap barang-barang muatan kapal, selain pencurian di Pelabuhan juga sering terjadi penyelundupan barang-barang yang dilakukan oleh para preman.

Kawasan lampu lalu lintas (*traffic light*) juga merupakan daerah yang rawan terhadap tindak kejahatan, seperti perampokan, perampasan, dan penodongan. Di Jakarta terdapat 148 buah *traffic light*, enam belas di antaranya merupakan daerah rawan. Masing-masing *traffic light* tersebut adalah seperti Grogol, Slipi, Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jembatan Merah, Stasiun Kota, Roxi, Senen, Sarinah, CSW Kebayoran Baru, Cawang, Halim, Cililitan, Jalan Enggano Tanjung Priok, Bintang Mas ancol dan Harmoni.

Terminal juga menjadi kawasan rawan terhadap kriminalitas, baik terminal bus antar kota antar provinsi seperti Kalideres, Pulo Gadung, Kampung Rambutan dan Lebak Bulus, sedangkan terminal bus dalam kota seperti Senen, Pasar Minggu, Blok M, Tanah Tinggi dan Rawamangun. Selain kawasan terminal, kawasan stasiun juga menjadi daerah yang rawan terhadap tindak kejahatan. Terminal dan stasiun merupakan tempat yang ramai untuk orang berlalu lalang melakukan perjalanan baik dari dalam kota maupun dari luar kota. Para penumpang kendaraan umum tersebut menjadi sasaran para pelaku tindak kejahatan (Sriasih dan Trilaksana, 2014).

Tingginya angka kriminalitas di Jakarta identik dengan keberadaan para preman atau bandit yang meresahkan warga ibukota. Sebenarnya, keberadaan para preman atau bandit tidak hanya meresahkan warga ibukota Jakarta, keberadaan mereka juga banyak meresahkan kota-kota lainnya bahkan di pedesaan sekalipun di Indonesia terutama di wilayah Jawa Tengah. Tingkat keresahan warga atas preman dan bandit juga sangat tinggi, sehingga hal tersebut membuat pemerintahan Orde Baru pada saat itu juga mengambil langkah yang sangat serius dan tegas dalam membasmi preman-preman atau bandit di Indonesia.

Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus adalah suatu operasi rahasia pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap, karena itu muncul istilah "petrus" (penembak misterius).

Petrus berawal dari operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta. Pada tahun 1982, Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Mayjen Pol Anton Soedjarwo atas keberhasilan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Pada Maret tahun yang sama, di hadapan Rapim ABRI, Soeharto meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif menekan angka kriminalitas. Hal yang sama diulangi Soeharto dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1982. Permintaannya ini disambut oleh Pangkopkamtib Laksamana Soedomo dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Wagub DKI Jakarta di Markas Kodam Metro Jaya tanggal 19 Januari 1983. Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan Operasi Clurit di Jakarta, langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di masing-masing kota dan provinsi lainnya.

Pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas, 367 orang di antaranya tewas akibat luka tembakan. Pada Tahun 1984 ada 107 orang tewas, di antaranya 15 orang tewas ditembak. Tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 di antaranya tewas ditembak. Para korban Petrus sendiri saat ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan dan kebun. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat keamanan. Petrus pertama kali dilancarkan di Yogyakarta dan diakui terus terang oleh M. Hasbi yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Kodim 0734 sebagai operasi pembersihan para gali atau gabungan anak liar (Kompas, 6 April 1983). Terlepas dari pro dan kontra, Petrus telah berhasil menekan tingkat kejahatan. Kejahatan di ibukota Jakarta dan di daerah lainnya menurun secara tajam.

Keberadaan para pelaku kejahatan yang diistilahkan dengan preman, bandit, gali atau istilah lainnya tidak lepas dari catatan sejarah kriminalitas di Indonesia. Beberapa peneliti termasuk peneliti asing seperti Colombij Freek, Thomas Linblad, Henk Schulte Nordholt, menyebut bahwa catatan sejarah kriminalitas di Indonesia tidak lepas dari rekam jejak kriminal pada masa kolonialisme Belanda (Freek, 2002). Pada masa kolonialisme Belanda, Angka pencurian di Jawa terbilang cukup tinggi. Sayangnya angka pasti tindak kriminalitas sulit dilacak, karena menurut Welvaartsrapporten (laporan kolonial tentang masalah kesejahteraan), pejabat administrasi berpangkat rendah cenderung tidak melaporkan tindak kejahatan. Pada umumnya orang akan berasumsi bahwa perbanditan muncul dan berkembang karena faktor ekonomi. Asumsi tersebut tidak salah, namun di Hindia Belanda dan khususnya Batavia perbanditan tidak hanya tumbuh karena masalah ekonomi (Fathoni, 2023).

Angka pencurian di Jawa terbilang cukup tinggi. Sayangnya angka pasti tindak kriminalitas sulit dilacak, karena menurut Welvaartsrapporten (laporan kolonial tentang masalah kesejahteraan), pejabat administrasi berpangkat rendah cenderung tidak melaporkan tindak kejahatan. Pada umumnya orang akan berasumsi bahwa perbanditan muncul dan berkembang karena faktor ekonomi. Asumsi tersebut tidak salah, namun di Hindia Belanda dan khususnya Batavia perbanditan tidak hanya tumbuh karena masalah ekonomi. Margreet van Till (dalam Fathoni, 2023) menyatakan pencurian terus tumbuh bahkan saat Hindia-Belanda sedang mengalami periode yang relatif cukup makmur. Pada periode tersebut terjadi peningkatan jumlah orang yang mampu mengoleksi barang-barang mewah. Golongan inilah yang sering menjadi target perbanditan.

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah historiografi. Jika metode secara sederhana diartikan sebagai jalan, cara, prosedur untuk mengetahui (*how to know*), maka metode sejarah bisa dipahami sebagai jalan, cara, atau prosedur untuk mengetahui suatu fenomena sosial di masa lalu, tentu sesuai topik yang dipilih. Tahapan heuristik merupakan

tahapan pencarian dan penemuan sumber sejarah, baik primer maupun sekunder, yang relevan untuk dituliskan. Dalam tahap ini, penulis menelusuri sumber-sumber sejarah di beberapa tempat, seperti kantor koran Harian Tempo, Kompas, *Pos Kota*, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan Polda Metro Jaya di Jakarta. Sejauh ini, penulis telah menemukan sebagian besar sumber sejarah primer dari Kompas dan Majalah Tempo yang (akan) menjadi sumber dan data penting penelitian ini. Arsip-arsip terkait kriminalitas bisa ditelusuri di ANRI dan Polda Metro Jaya. Surat kabar bisa ditelusuri di kantor surat kabar terkait dan Perpustakaan Nasional. Penulis juga menelusuri sumber-sumber sejarah pendukung di internet sebagai upaya melengkapi tulisan. Tahapan heuristik ini juga rencananya melibatkan wawancara para pelaku sejarah.

Tahapan verifikasi merupakan tahapan kritik sumber yang terbagi menjadi dua hal: internal dan eksternal. Kritik internal merupakan kritik substansi dari sumber sejarah terkait, khususnya akurasi data. Dalam hal ini, penulis menyeleksi, menganalisis, dan menilai sumber-sumber yang penting dan relevan untuk historiografi dan sejauh mana sumber itu akurat. Sementara, kritik eksternal adalah kritik keaslian sumber. Dalam hal ini, penulis melihat bentuk luar sumber sejarah sejauh mana validasinya. Kesulitan dalam tahapan ini adalah kemampuan penulis dalam menilai keabsahan sumber sejarah yang terkadang perlu ketelitian dan kesabaran dalam menuliskannya.

Tahapan interpretasi merupakan tahap analisis data-data sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Interpretasi yang baik adalah interpretasi yang dilakukan seobyektif mungkin tanpa berpihak pada subyek tertentu. Penulis mencoba untuk mengedepankan obyektivitas tersebut sehingga menjadikan karya penelitian ini sebagai karya penelitian yang jujur. Tahapan historiografi merupakan tahap penulisan sejarah. Setelah dilakukan heuristik, verifikasi, dan interpretasi, maka penulisan sejarah dibuat sedemikian rupa. Penulisan sejarah sesuai dengan sumber-sumber sejarah yang valid, diikuti dengan analisa data yang obyektif. Penulis membuat tulisan sejarah secara kronologis, terstruktur, dan sistematis.

Penelitian ini menggunakan sumber sejarah primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber langsung sezaman yang pernah diterbitkan. Sumber ini menjadi sumber terpenting dalam historiografi karena memperlihatkan fakta-fakta sejarah yang pernah terjadi. Sedangkan, sumber sekunder merupakan sumber pendukung yang bisa melengkapi historiografi. Sumber sekunder berisikan tulisan-tulisan sejarah terkait topik yang dituliskan dalam historiografi.

Bandit di Jawa Masa Kolonial

Beberapa daerah di Jawa terkenal karena menjadi markas para bandit. Pantai Utara Jawa, Kediri-Madiun, Banyumas dan Batavia menjadi daerah-daerah yang terkenal karena rawan terjadi perampokan. Pada tahun 1919 dan 1920, jumlah bandit semakin banyak, di daerah *Meester Cornelis* (Jatinegara) saja terdapat total 170 rampok *partijen* (kelompok perampok) (Cribb, 1991). Di dunia kriminal atau sering disebut *alam peteng*, bandit dapat dibagi ke dalam tiga jenis utama, yakni maling *krowdan*, maling tengah dan maling ketut. Sebagian besar pencuri termasuk dalam maling *krowdan* atau penjahat non-profesional. Maling tengah biasanya beroperasi secara individual dan ruang gerak mereka terbatas di suatu wilayah. Sementara maling ketut atau kecu merupakan perampok yang beroperasi secara berkelompok. Seringkali kecu berkelana ke tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka (Quinn, 1975).

Sebelum menjadi pencuri, kebanyakan dari para bandit tersebut berprofesi sebagai petani. Kendati sebelumnya mereka adalah petani bukan berarti sasaran utama perampokan mereka adalah golongan kelas atas. Realitas yang terjadi malah sebaliknya, terkadang korban perampokan justru berasal dari kalangan petani. Anton Blok (2001) dalam tulisannya berjudul

Honour and Violence memaparkan bahwa para bandit justru tinggal berdekatan dengan para korbannya. Bahkan beberapa tinggal di desa yang sama dan kenal dekat dengan para korban. Dalam melakukan aksinya para bandit tidak segan menggunakan kekerasan kepada para korbannya apabila melawan. Bahkan sering kali menyebabkan korban jiwa seperti yang dilaporkan harian Java Bode 4 Juni 1918.

Dalam artikel berjudul “Rampok”, dilaporkan perampokan yang terjadi di kampung pecinan. Perampok yang membawa senjata api itu menembak penghuni rumah yang melakukan perlawanan, dua orang terbunuh akibat peristiwa ini. Perampok berhasil mengambil 2000 gulden, sementara polisi yang menuju ke lokasi datang terlambat karena sempat salah rumah. Walaupun tindak kekerasan terkadang ditemui dalam aksi pencurian, namun para bandit berupaya untuk menggunakan metode non-kekerasan dalam operasi mereka. Para bandit lebih memilih menggunakan mantra untuk membuat tidur yang dikenal sebagai aji sirep. Seorang kepala bandit atau yang disebut juga benggol biasanya memiliki jimat yang diyakini memberikan kekebalan dan kekuatan. Karena dianggap sakti dan berkarisma, para benggol di pedesaan Jawa sering kali memimpin kelompok perampok hingga usia tua.

Multatuli dalam buku Max Havelaar sebagaimana dikutip (Nawi, 2023), di daerah Banten dan seputar Batavia telah muncul perbanditan terorganisasi yang daerah operasinya meliputi Banten, Tangerang, Jatinegara, Bekasi, Karawang, dan Bogor. Istilah perbanditan memiliki pandangan subjektivitas dari dua kutub yang berbeda, satu sisi dari pandangan pihak pemerintah kolonial dan pengelola perkebunan dan satu sisi dari kalangan penduduk, petani atau rakyat kecil.

Pemerintah kolonial dan pengelola perkebunan menganggap mereka yang mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan, keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) di daerah perkebunan baik itu sendiri maupun kelompok dengan cara merampok, mencuri, dan bahkan membunuh disebut sebagai *Bandiet* (penjahat), *Bendewezen* (kawan pengacau), dan *Roofpartij* (rampok). Sementara masyarakat menganggap resistensi mereka merupakan manifestasi protes sosial terhadap tindakan pemerintah dan tuan tanah pengelola perkebunan yang dianggap merugikan petani sebagai Pahlawan atau Jago, meskipun cara-cara yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak normatif, seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.

Sejarawan sosial Inggris E.J. Hobsbawm mendefinisikan istilah Bandit sebagai seseorang atau kelompok yang merampok dengan kekerasan. Namun demikian Bandit ini dibedakan menjadi Bandit Biasa (*Ordinary Bandit*) dan Bandit Sosial (*Social Bandit*). Bandit biasa melakukan kejahatan dengan cara merampok tanpa latar belakang apapun, semata-mata hanya tindakan kriminal biasa. Sedangkan Bandit Sosial adalah perbuatan seseorang atau sekelompok untuk merampok yang dilatar belakangi adanya kepentingan sosial-politik, sebagaimana yang dilakukan kaum tani di Batavia dan *Ommelanden* yang memunculkan perlawanan dalam suasana tertekan karena kehidupan ekonominya dikorup oleh para penguasa tanah perkebunan swasta, mereka menolak institusi kolonial yang mendesak institusi pribumi (*counter institution*).

Di beberapa belahan dunia lain, manifestasi protes sosial terhadap kesewenang-wenangan dengan cara-cara perbanditan yang mendapat dukungan dari masyarakat seperti Ishikawa Goemon dari Jepang dan Robin Hood dari Hutan Sherwood, Inggris secara implisit mengilhami bentuk dan pola perlawanan kaum tani di Hindia Belanda. Melahirkan orang atau sekelompok orang yang dianggap sebagai para pelanggar hukum berhati mulia (*Noble Outlaw*). Nama-nama mereka begitu melegenda seperti Si Pitung dari Rawabelong, Si Gantang dan Entong Tolo dari Pondok Gede serta Pa'ih dari Cibarusah, Entong Gendut di Condet dan Kaiin Bapa Kayah di Tangerang (Nawi, 2023).

Menurut sejarawan Suhartono (dalam Tifaransyah, dkk., 2021), perbanditan pada masa kolonial adalah merampas harta milik orang lain. Biasanya perbanditan ini ditujukan sebagai aksi protes sosial terhadap pemerintah Hindia Belanda, bukan untuk memperkaya diri tetapi untuk

kepentingan sosial. Kejahatan kriminal di masa sekarang tidak jauh berbeda dengan kejahatan kriminal di masa lalu. Di masa lalu tindak kriminal ada berbagai macam, seperti perbanditan (sekarang disebut premanisme) dan begal. Perbanditan di Jawa sudah terjadi sejak dulu yang terjadi di beberapa Kota seperti Batavia, Surakarta dan Yogyakarta, dan juga Probolinggo dan Pasuruan. Tindak kriminal perbanditan dan juga pembegalan ini juga mencakup tindak kriminal yang lain, yaitu tindak kriminal kekerasan dan juga pemerasan.

Pada masa kolonial, Jawa menurut Gubernur Thomas Stamford Raffles memiliki reputasi yang aman dan damai, akan tetapi itu salah besar. Sering terjadi pergolakan dan pertentangan antara Hindia Belanda dengan rakyat Indonesia atau antar rakyat Indonesia itu sendiri setiap waktu. Penjajahan ini tidak hanya menimbulkan masalah politik, melainkan masalah sosial juga seperti yang terjadi di desa yaitu pencurian, pembunuhan, perampokan, pembakaran rumah, dan pembakaran kebun. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara ilegal tanpa izin dengan pemiliknya. Pedesaan di era kolonial rentan atau mudah terjadi kriminalitas, alasannya yaitu karena tingkat pengangguran dan kemiskinan di pedesaan yang masih tinggi. Kriminalitas yang tinggi membuat masyarakat merasa resah dan takut untuk bepergian. Tindak kriminal ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan berkelompok (Thifaransyah, dkk., 2021).

Media Massa Menuliskan Sejarah Kriminal 1980-1990

Sejarah kriminalitas di Ibu Kota Jakarta pada tahun 1980-1990 dalam pemberitaan Harian *Pos Kota* yang akan menjadi fokus penelitian ini bisa jadi memiliki tali temali dengan tali temali atau kontinuitas dari kejahatan/ kriminalitas pada masa lampau atau masa sebelumnya. Sehingga penelitian ini akan dilakukan dalam perspektif kesejarahan. Dalam perspektif ini, penelitian akan dilakukan dengan menggunakan empat tahapan yakni *heuristic*, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Dalam penelitian ini mengenai koran *Pos Kota*, merupakan koran kuning yang ada sejak orde baru berkuasa. Keberadaan koran kuning tidak hanya muncul pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang otomatis menggugurkan undang-undang tentang pers terdahulu, seiring runtuhnya rezim Orde Baru yang dikenal amat represif terhadap pers. Salah satu kelebihan dari Undang-Undang produk Orde Reformasi ini adalah dihapuskannya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan tiadanya pembredelan, sehingga memungkinkan siapa pun dapat bergelut di bidang penerbitan pers. Berdasarkan penelusuran kepustakaan, persoalan sensasionalitas berita telah muncul dan dikeluhkan sejak Demokrasi Liberal antara 1950-1959, di mana kala itu Indonesia menganut sistem multipartai dan dengan sendirinya berbagai penerbitan yang ada umumnya merupakan bagian dari organ partai, sehingga lebih menyuarakan kepentingan partai. Akibatnya, antara satu koran dengan koran yang lain kerap kali terlibat dalam perang berita, tajuk rencana, karikatur, dan pojok pers, yang ditujukan untuk saling menjatuhkan. Meski demikian koran-koran yang diterbitkan oleh orang-orang Belanda dan Cina pun bermunculan.

Hal yang sama berlaku untuk surat kabar yang sama sekali tidak mendukung kepentingan partai. Intinya, era liberalisme bukan hanya era pertarungan debat antar partai politik, tetapi juga ditandai dengan munculnya kepentingan (baca: pasar) kapitalisme. Hal ini sangat mungkin karena, seperti diutarakan oleh Wikrima (dalam Sukardi, 2007, hlm. 2), di era sistem politik liberal dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS), kebebasan pers mendapat ruang yang cukup luas. Pada masa itu pemerintah mengakui kebebasan pers dan dalam praktiknya pers dapat memperoleh liputan yang dibutuhkannya. Namun, keadaan ini mau tidak mau menimbulkan masalah tersendiri, terutama bagi pemerintah, karena pemberitaan berbagai surat kabar dinilai mengganggu kepemimpinan dan stabilitas, terutama di bidang politik. Berita

“berbau” sensasionalisme (*linguistik*), provokatif dan ditujukan untuk menyerang lawan politik, setidaknya itulah yang dikatakan surat kabar saat itu (Said, 1988:85-116). Misalnya, surat kabar Kalimantan Berjuang edisi 31 Desember 1951 memuat tajuk utama: Dr. Diapari: Indonesia kini menjadi negara anarki. Susunan kabinet harus dibongkar. Kemudian surat kabar Landscape, dalam terbitan 8 Agustus 1955, menulis tajuk utama: PKI paling aktif dalam krisis saat ini. Sampai-sampai menyalahgunakan buta huruf.

Kebebasan pers di era demokrasi liberal juga memiliki konsekuensi logis bagi para wakil pers. Pemerintah yang merasa “kelelahan” dan tidak mampu mengharmoniskan kebebasan pers yang sedang berlangsung, akhirnya melakukan tindakan represif dengan melarang beberapa surat kabar dan menangkap wartawan. Secara garis besar, surat kabar yang dilarang dan jurnalis yang ditangkap terlibat dalam lima jenis kejahatan, yaitu kejahatan terhadap kepala negara/kepala negara, kejahatan terhadap pemerintah, kejahatan terhadap organ negara dan pejabat dalam menjalankan tugas mereka, dan kejahatan terhadap kepala negara yang bersahabat. kepala negara dan wakil kepala negara (Said, 1988, hlm.101). Salah satu tindak pidananya adalah Merdeka pada tahun 1952. Saat itu Menteri Keuangan Dr. Sumitro Merdeka untuk tulisan dan kartun tentang penjualan besi tua sisa Perang Dunia II di Pulau Morotai dekat Halmahera. Saat itu Sumitro menyebut Merdeka sebagai koran kuning, menurut pemimpin redaksi B.M. Diah kembali menuntut Sumitro. Pengarang Soebagijo I.N. (Said, 1988, hlm.104), istilah “koran kuning” telah digunakan dalam pers Indonesia sejak saat itu.

Meskipun koran kuning muncul sejak era demokrasi liberal, namun perwujudan sejati koran kuning di Indonesia - seperti fenomena koran kuning di Amerika - baru muncul di era Orde Baru, ketika koran *Pos Kota* menampilkan trilogi terbitannya, yakni informasi: kejahatan, kekerasan dan seksualitas. *Pos Kota* didirikan oleh Harmoko yang juga mantan Menteri Penerangan pada era Soeharto, Yachya Suryawinata (jurnalis), Tahar S. Abiyasa (wartawan), S. Harsono (pengusaha), dan Pansa Tampubolon (pengusaha). Lukman Solihi dalam tulisan *Etnografi Sejarah Koran Kuning (2) Pos Kota: Sang pemula* (<http://ethnohistori.org/ethnography-history-korankuning-2-pos-kota-sang-beginner-lukmansolihin.html>) menulis cukup panjang lebar tentang bagaimana sejarah berdirinya *Pos Kota* menjadi surat kabar populer dan muncul di banyak surat kabar pada masanya. Gaya sensasional disalin kemudian. Menurut Lukman, Harmoko mencetuskan gagasan koran kuning itu saat menghadiri konferensi yang disebut Majelis Asia yang diselenggarakan oleh Press Foundation of Asia (PFA) pada April 1970 di Manila, Filipina. Saat itu, surat kabar populer yang dijual murah di pinggir jalan tersebar di Manila. Sejak saat itu, Harmoko tertarik untuk menerbitkan surat kabar serupa di Indonesia. Maka pada April 1970, *Pos Kota* terbit dengan oplah sebanyak 3.500 eksemplar dan dijual dengan harga eceran Rp 10,00, harga yang setara dengan ongkos sekali jalan bus kota di Jakarta kala itu. Meski usianya belum genap setahun keberadaan *Pos Kota* sebagai koran populer berhasil menarik perhatian khalayak ibu kota. Oplah *Pos Kota* semakin melejit mencapai angka 21.000 eksemplar setelah secara bersambung memuat cerita sensasional tentang bayi ajaib yang bisa bicara dalam perut ibunya, Cut Zahara Fona, dan tentang berita kematian Presiden Soekarno. Meskipun terbukti bahwa Cut Zahara Fona telah melakukan penipuan karena menyimpan *tape recorder* kecil yang disetel untuk mengeluarkan suara tertentu seperti suara bayi mengaji di balik setagen dalam gaun yang dipakainya, namun cerita tentang bayi ajaib ini telah melambungkan nama dan mendongkrak oplah *Pos Kota* di tahun pertamanya terbit.

Fenomena *Pos Kota* dengan berhasil memosisikan diri sebagai koran populer dengan berita-berita sensasionalitasnya mirip dengan fenomena koran-koran sejenis di Amerika pada penghujung 1800-an yang kemudian melahirkan istilah koran kuning yang para pembacanya adalah masyarakat bawah. *Pos Kota* juga berhasil menyasar pembaca kelas bawah ibu kota,

dengan berita-berita seputar kriminalitas, kekerasan dan seksualitas. *Pos Kota* juga tampil dengan cerita-cerita bergambar seperti komik *Yellow Kid* yang muncul di halaman *New York World*, dengan tokoh dan cerita Doyok, Dul Kemplo, dan sebagainya. Ciri khas lain adalah pada segi tampilan, koran ini dicirikan dengan tata letak dengan menonjolkan judul berita yang ditulis besar dengan kalimat bombastis. Bahkan sebagai penonjolan, judul dan tubuh berita diberikan warna tertentu. Rosihan Anwar sebagaimana dikutip Lukman, menyebut tata letak *Pos Kota* sebagai tata letak yang amburadul. Selain judul dan berita sensasionalitas, *Pos Kota* juga menampilkan rubrik khusus seperti Nah Ini Dia yang isinya tak kalah sensasional dengan berita-berita yang ditampilkan. Kelahiran *Pos Kota* sebagai koran populer di era Orde Baru dinyatakan seperti sebuah anomali dan seolah melawan arus. Selain dikenal dengan kekangan atas kebebasan persnya, surat kabar-surat kabar yang ada kala itu cenderung dengan pemberitaan-pemberitaan dengan gaya bahasa formal sesuai dengan semangat rezim Orde Baru yang sangat formalistis, sehingga banyak pihak memandang koran seperti itu hampir mustahil bisa terbit di Indonesia. Rosihan Anwar, sebagaimana dikutip Lukman, menyatakan alasan kemustahilan terbitnya koran populer kala itu. Pertama, sejak awal para wartawan yang terlibat aktif dalam pergerakan nasional adalah orang-orang yang serius mengemban misi perjuangan. Demi gengsi, mereka enggan menerbitkan koran populer. Kedua, jika berani menerbitkan koran populer, mereka akan berhadapan dengan kenyataan bahwa masyarakat kelas bawah belum memiliki daya beli yang cukup untuk berlangganan koran.

Usulan nama *Pos Kota* sebagai *brand image* juga merupakan kreasi Harmoko. Nama itu merupakan penjabaran ide tentang keinginan menyampaikan berbagai informasi, katakanlah semacam pos yang diketahui merupakan sarana dalam seseorang berkirim kabar atau berita, sedangkan kota berkesan kuat dari penggalan nama yayasan tersebut. (Ghazali dan Nasution, 2000:5)



Gambar 1 Logo Koran PosKota, Litbang PosKota, 2023

Faktanya, kehadiran *Pos Kota* sebagai koran populer justru sangat diminati dan memperoleh tempat khusus di masyarakat akar rumput. Mengomentari fenomena ini, Jakob Oetama menyatakan sebagai cerminan keinginan pembacanya. Dalam hal ini ia mengatakan bahwa media populer ini menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai hal-hal yang sifatnya tetek bengkek tetapi dengan aroma sensasional, sama halnya dengan perasaan ingin tahu tentang gosip tetangga maupun rekan kerja. Sedangkan Ashadi Siregar yang melihat dari sisi dunia sosial pembacanya yang notabene kaum urban mengatakan bahwa *Pos Kota* telah menggantikan media sosial lama yang hilang selama berada di Jakarta. Kaum urban kelas bawah yang merupakan pendatang telah kehilangan ruang-ruang komunikasi sehari-hari untuk membicarakan persoalan mereka. Kaum pendatang ini memerlukan media untuk saling bertukar informasi layaknya kebiasaan mereka dalam bergosip. Ketika di kampung, mereka dapat berkumpul dengan tetangga, mengobrol di pos ronda, atau di warung kopi. Topik obrolannya adalah masalah seputar mereka, tentang kejadian sehari-hari seperti si Polan yang kemalingan, anak Pak Soma yang hilang, mbakyu Anu ketangkap basah, Si Sono bunuh diri, atau harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Media sosial inilah yang hilang dan lalu diisi oleh *Pos Kota*.

Jika kita bicara tentang sejarah media di Indonesia, maka yang kita bicarakan pasti akan bersinggungan dengan KOMPAS. Kompas edisi pertama dicetak oleh P.N. Eka Grafika, milik

harian Abadi yang berafiliasi pada Masyumi. Tepat 28 Juni 1965, Kompas mulai diterbitkan untuk pertama kalinya dengan moto “Amanat Hati Nurani Rakyat.” Berita utama pada halaman pertama berjudul “Konferensi Asia-Afrika II Ditunda Empat Bulan.” Sementara Pojok kanan bawah mulai memperkenalkan diri dengan kalimat “Mari ikat hati. Mulai hari ini, dengan Mang Usil”. Kompas sebuah surat kabar harian pertama kali yang terbit di Jakarta sejak pada 28 Juni 1965, maka dari itu tanggal 28 Juni dijadikan hari lahir Kompas. Kompas edisi perdana dengan 20 halaman berita di halaman I, terbit empat halaman. Terbit sebanyak 4.828 eksemplar dengan harga langganan Rp 500 per bulan.

Saat terbit kembali pada 6 Oktober 1965, tiras Kompas menembus angka 23.268 eksemplar. Zaman berganti. Soekarno diganti Jenderal Soeharto. Pada 1999, setahun sesudah Soeharto dipaksa mundur, tiras Kompas mencapai angka lebih dari 600 ribu eksemplar per hari. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset AC Nielsen tahun 1999 menunjukkan pasar terbesar masih seputar Jakarta 46,77%, Bogor, Tangerang, dan Bekasi 13,02%, Jawa Barat 13,02%, Jawa Tengah, Yogyakarta 6,67%, Jawa Timur 2,04%, Sumatra 8,81%, Kalimantan 2,16%, dan Indonesia Timur 4,23%. Gramedia sebagai perusahaan induk Kompas tercatat sebagai perusahaan yang membayar pajak terbesar nomor 32 pada tahun 1980 sedang pada tahun pada tahun 1993 untuk perusahaan PT Kompas Media Nusantara saja diperkirakan menghasilkan Rp 240 miliar setahun dengan keuntungan bersih Rp 30 sampai 35 triliun. Tahun 1991 PT Gramedia dengan penerbitan bukunya menduduki urutan ke-151.

Seiring dengan pertumbuhannya, seperti kebanyakan surat kabar yang lain, harian Kompas saat ini dibagi menjadi tiga bagian (*section*), yaitu bagian depan yang memuat berita nasional dan internasional, bagian berita bisnis dan keuangan, bagian berita olahraga dan iklan baris yang disebut dengan “Klasika”. Harian Kompas diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara. Bahkan menurut sebuah laporan yang dikeluarkan *Reuters Institute for the Study of Journalism* dan *Universitas Oxford* pada tahun 2021, Kompas merupakan surat kabar yang paling banyak diakses masyarakat Indonesia, dengan 39% responden mengaksesnya dalam seminggu terakhir. Selain itu, Kompas juga merupakan media kedua yang paling dipercaya masyarakat Indonesia dengan skor kepercayaan mencapai 67%, setingkat di bawah *CNN Indonesia* meski tak dijelaskan apakah itu mencakup seluruh media bermerek Kompas dari Kompas Gramedia (termasuk *Kompas TV*) atau hanya surat kabar ini saja.

Dalam melakukan pemberitaan kriminalitas dapat dikatakan Kompas menggunakan cara penulisan yang lebih halus. Kompas sebagai penyampai pesan melakukannya secara terbuka dan berimbang. Karena melalui berita yang ditulisnya, pembaca bisa menafsirkan keadaan yang terjadi. Menurut Harahap (2000:136) sebelum peristiwa malaria di masa Orde Baru, Kompas dikenal sebagai surat kabar yang idealis dan menyuarakan hati nurani rakyat secara kritis dan berani, namun setelah terjadinya peristiwa malaria fungsi Kompas berubah menjadi interpreter pernyataan pemerintah. Ashadi Siregar (dalam Sudibyo, 2001 : 29) mengemukakan bahwa pers Orde Baru adalah pers yang cenderung menjadi cermin realitas psikologis elite atau pejabat pemerintah. Mereka lebih banyak memproduksi *talking news* yang datang dari elite negara daripada faktual *news*. Kebiasaan wartawan Kompas yang cenderung menampilkan pemberitaan-pemberitaan berupa kutipan perkataan dari pihak-pihak elite seperti pemerintah menimbulkan dugaan bahwa Kompas telah menjadi alat politik para elite. Kompas cenderung tidak berani menuliskan topik pemberitaan di luar apa yang dibicarakan oleh para elite politik, apalagi mengkritik aktor politik. Hal tersebut dilakukan Kompas karena dianggap efektif untuk dapat bertahan hidup.

Selain Kompas, ada media bernama Koran Tempo yang masuk jajaran yang layak untuk dikupas bersama. Koran Tempo awalnya dibentuk dengan berformat majalah pada tahun 1971 atas gagasan wartawan muda di Jakarta. Awalnya keinginan Goenawan Mohamad untuk membuat majalah yang berbeda dari bentuk-bentuk yang sudah ada terealisasi melalui kelahiran

majalah *Ekspress* pada 1969. Tapi kemudian terjadi pertikaian dalam tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang membuat Goenawan Mohamad hengkang dari *Ekspress*. Namun tekad untuk mendirikan majalah sendiri tetap kuat di batin Goenawan dan rekan-rekan. Dimodali Rp 20 juta oleh Yayasan Jaya Raya milik pengusaha Ciputra, digawangi orang-orang majalah *Djaja* dan mantan personel *Ekspress*, lahirlah *Tempo* (Harsono, 2005:95).

Ada empat alasan pemilihan kata *Tempo* sebagai nama majalah. Pertama, nama itu singkat dan bersahaja, enak diucapkan oleh lidah Indonesia dari segala jurusan. Kedua, nama itu terdengar netral, tidak mengejutkan ataupun merangsang. Ketiga, nama itu bukan simbol suatu golongan. Dan keempat, "*Tempo*" yang berarti waktu dengan segala variasinya lazim digunakan oleh banyak penerbitan seluruh dunia.

Perjalanan *Tempo* bukannya tanpa rintangan. Tanggal 12 April 1982, *Tempo* dibredel selama dua bulan karena mengeluarkan artikel yang mengindikasikan kecurangan pada PEMILU tahun 1982. Pada Juni 1994, *Tempo* kembali dibredel bersama *Editor* dan *Detik*. Kali ini alasannya ialah laporan utama tentang pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur oleh B.J. Habibie, orang kepercayaan Soeharto.

Pada ulang tahun yang ke-30, 2 April 2001, *Tempo* melahirkan *Koran Tempo*, surat kabar harian yang ingin mengembalikan prinsip-prinsip jurnalisme harian yang kini terabaikan, yaitu cepat, lugas, tajam dan ringkas. *Koran Tempo* berusaha meraih pembaca yang masih terbuka lebar, bersaing dengan *Kompas*, *Republika*, dan *Media Indonesia*. Hasilnya luar biasa, di Jakarta, *Koran Tempo* berhasil menjadi peringkat kedua di bawah *Kompas* (Harsono, 2005:136).²

Koran Tempo juga memiliki sejarah yang cukup kelam, dibredel oleh pemerintahan orde baru karena mengkritisi pemerintah. Memang sebagai kekhasan *Tempo* yang selalu ingin menjadi pisau tajam untuk pemerintah, membedah sedalam-dalamnya kinerja dan prestasi pemerintah. Jika diamati, *Koran Tempo* hampir mirip dengan majalah *Times* di USA. Mengkritisi pemerintah bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi.

Pemberitaan Kriminalitas yang diberitakan oleh *Koran Tempo* pada Tahun 1980 sampai 1990 berkisar kejahatan atau kriminalitas dari berbagai pelosok Indonesia. Namun jika kita mau khusus membahas terkait yang terjadi Jakarta maka banyak kejahatan yang terjadi di kota Jakarta yang disebabkan oleh minuman keras. Di antaranya perkelahian, penganiayaan, penjudian dan bahkan sampai pembunuhan. Ditambah lagi kebiasaan mabuk-mabukan kaum remaja ibukota Jakarta penyumbang angka kriminalitas di Jakarta. Bahasa penulisan koran *Tempo* cenderung lebih berani dan faktual. Seperti faktual, akurasi juga termasuk bagian dari *truth* (kebenaran) dalam objektivitas media yang berkaitan langsung dengan ketepatan data yang diberitakan, tidak terdapat kesalahan. Dalam penulisan berita terkait kriminalitas, sebuah peristiwa fakta dan opini merupakan dua hal yang berbeda. Berita yang baik yaitu berita yang tidak mencampuradukkan antara fakta dan opini di dalam pemberitaannya. Hal ini sesuai dengan prinsip jurnalisme yaitu mengutamakan kebenaran. Dan *Koran Tempo* dapat dikatakan melakukannya dengan sangat baik.

Geografis Jakarta & Kriminalitas di Jakarta

Dalam penelitian ini kondisi geografis sangat berpengaruh terhadap perkembangan budaya, meski tidak selalu menjadi faktor terbesar, tetapi satu-satunya faktor penentu. Misalnya, meskipun budaya sungai berkembang di sepanjang Sungai Nil dan Tigris-Efrat, tidak ada masyarakat yang secara fisik dapat dibandingkan dengan mereka yang tinggal di Lembah Yordan dan Rio Grande del Norte (Walter Wallbank, 1976:4), bahkan tidak dekat Jakarta. Fakta bahwa karakteristik Sungai Ciliwung, salah satu dari 13 sungai kecil, misalnya, bisa jadi menjadi faktor lahir dan berkembangnya peradaban Jakarta di masa lalu, tampaknya bukan sekadar persamaan. Tetapi intinya adalah bahwa elemen aliran adalah salah satu blok bangunan peradaban. Peradaban muncul dan berkembang di muara sungai-sungai besar dunia. Terkait dengan Jakarta,

pertumbuhan dan perkembangan peradaban di dalam dan sekitar Jakarta sejak zaman prasejarah telah dibentuk oleh lingkungan geologis dan geografis yang strategis dan memungkinkan. Disebabkan oleh aktivitas gunung berapi di wilayah selatan yaitu Gunung Salak, Gede dan Pangrango yang menjadikan daerah ini dataran banjir.

Jakarta dalam penelusuran sejarah peradaban menarik diungkapkan karena beberapa pertimbangan. Pertama, dari perspektif geo-historis, daratan alluvial, tempat bermuaranya 13 sungai dari pedalaman kemudian muncul dan tumbuh suatu pelabuhan Kalapa, dikendalikan oleh kerajaan Sunda, sehingga dikenal sebagai Sunda Kalapa. Kedua, karena besarnya potensi yang semakin aktual memegang peran penting dan sehingga diperebutkan oleh pemegang kepentingan ekonomi dan perdagangan; ketiga, sebagai lokasi pusat dari suatu pemerintahan atau kuasa dari kerajaan terdahulu, Jakarta silih berganti diperebutkan secara politik. Keempat, sebagai ruang kehidupan bersama dari beragam etnik dan bangsa beserta ragam kebudayaannya, Jakarta menjadi "*melting pot*" yang semakin dinamis. Bagaimana masing-masing etnik atau bangsa memelihara kebudayaannya, bagaimana tradisi kesenian dan sastra, untuk tidak menyederhanakan pengertian luas dari kebudayaan itu sendiri.

Jika kota adalah ruang hidup bersama yang nyaman bagi para warganya, pertanyaannya bagaimana Jakarta mampu melayani dan memenuhinya. Jakarta, sebuah kota yang bergerak dinamis, sesungguhnya masih belum dapat keluar dari anggapan bahwa ia sesungguhnya masih merupakan "kampung besar" itu. Meskipun secara fisik Jakarta telah memiliki banyak gedung bertingkat dan jalan raya dengan jaringannya yang luas, akan tetapi kriteria kota dalam konteks peradaban adalah ruang hunian yang memartabatkan warganya. Tentu saja kota menuntut dari para warganya untuk memiliki sikap dan perilaku yang turut memelihara kenyamanan ruang kotanya sebagai bukti adanya peradaban. Adab merupakan kata dasar dari peradaban yang secara umum dimengerti sebagai capaian-capaian tertentu sebagai perwujudan dari hasil karsa, cipta, dan karya dalam aspek-aspek kehidupan suatu masyarakat. Dalam konteks itu capaian yang dimaksud umumnya diterima sebagai puncak-puncak yang diperlihatkan oleh proses historis suatu masyarakat-bangsa dalam memenuhi aspirasi dan keinginannya. Modal dasar untuk pencapaian itu dalam arti luas yaitu kebudayaan yang dimiliki setiap masyarakat-bangsa. Jika dari sekian arti kata "adab" adalah "kehalusan perilaku" yang terwujud dalam suatu kehidupan manusia, maka terdapat suatu masyarakat yang tertata dengan suatu sistem tertentu. Dengan tidak memberi penilaian baik atau buruknya untuk setiap pencapaian peradaban suatu masyarakat, penjelasan dari konsep kebudayaan, bahwa kehidupan manusia dapat dikenali melalui tahap-tahap masyarakat perundagian, pemburu-peramu, sampai pada tahap masyarakat yang telah menetap.

Dalam perkembangannya, kelompok sosial mestilah memiliki aturan dan mematuhi agar kehidupan dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Di dalam konteks itulah masyarakat mengatur dirinya melalui perwujudan aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Setiap ruang kehidupan suatu masyarakat sudah tentu memperlihatkan peradabannya sendiri. Dalam konteks ini peradaban sesungguhnya segera tampak dalam perilaku ketimbang unsur kebudayaan yang hakikatnya mengenai sistem nilai yang abstrak. Jakarta terbentuk oleh berbagai kontribusi dalam spektrum luas dan beragam, lokal, nasional, regional dan internasional.

Simpulan

Bahwa dalam penelitian ini sejarah kriminalitas di Ibu Kota Jakarta dalam pemberitaan Media Massa seperti *Pos Kota*, *Kompas* dan *Majalah Tempo* pada tahun 1980-1990, di klaim mengalami peningkatan dan juga beragam tindak kriminalitas yang terjadi, yang dapat dilihat dari bentuk kriminalitas di Ibukota Jakarta dalam pemberitaan *Pos Kota* pada tahun 1980-1990,

faktor yang menjadi penyebab kriminalitas tersebut terjadi dan upaya pemberantasan kriminalitas yang dilakukan pemerintah.

Batasan spasial dan temporal terhadap obyek material (substansial) penelitian yang dilakukan, bahwa batasan spasial adalah batasan lokalitas geografis, administratif maupun kebudayaan. Batasan temporal adalah batasan waktu atau periode penelitian yakni sejarah kriminalitas Ibukota Jakarta pada tahun 1980-1990. Sedangkan batasan yang ditetapkan maka batasan spasial dalam penelitian ini adalah wilayah Ibukota Jakarta yang mencakup 5 wilayah administratif yakni Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Bahwa terjadi dinamika pada tindak kriminalitas yang terjadi di Ibukota Jakarta dalam pemberitaan koran *Pos Kota* pada tahun 1980 sampai tahun 1990.

Referensi

- Adang, Y. A. (2010). *Kriminologi*. PT Refika Aditama.
- Blok, A. (2001). *Honour and violence*. Polity Press.
- Cribb, R. (1991). *Gangsters and revolutionaries: The Jakarta people's militia and the Indonesian revolution 1945-1949*. Asian Studies Association of Australia.
- Colombijn, F. (2002). Explaining the violence solution in Indonesia. *The Brown Journal of World Affairs*, 9(1), 1–15.
- Fathoni, R. S. (2023). Bandit-bandit di Jawa masa kolonial. *Wawasan Sejarah*.
<https://wawasansejarah.com/bandit-kolonial/>. Diakses pada 12 April 2023.
- Ghani, Z. A. (2017). Sebuah studi perbandingan kejahatan perkotaan antara Malaysia dan Nigeria. *Jurnal Manajemen Perkotaan*, 6(1), 19–29.
- Marzuki, S. (2014). Masalah kejahatan di perkotaan. *Unisia*, 9, 11–13.
- Nassarudin, E. H. (2016). *Kriminologi*. CV Pustaka Setia.
- Nawi, G. J. (2023). Perbanditan di Batavia dan protes sosial.
<https://sejarahjakarta.com/2019/05/09/perbanditan-di-batavia-dan-protes-sosial/>.
 Diakses pada 12 Desember 2023.
- Nordholt, H. S. (1991). The Jago in the shadow: Crime and order in the colonial state in Java. *Review of Indonesian and Malayan Affairs*, 25(1), 1–15.
- Sriasih, K., & Trilaksana, A. (2014). Premanisme di Jakarta tahun 1974-1983. *Avatara: e-Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2(2), 1–15.
- Tifaransyah, F., et al. (2021). Kriminalitas di Jawa pada masa kolonial. *Jurnal Candra Sangkala*, 3(2), 1–15.
- Zaidan, M. A. (2016). *Kebijakan kriminal*. Sinar Grafika.
<http://e-journal.uajy.ac.id/2368/3/2KOM03080.pdf>. Diunduh pada 12 Desember 2023.
<https://sejarahjakarta.com/2019/05/09/perbanditan-di-batavia-dan-protes-sosial/>. Diakses pada 12 Desember 2023.
<http://sejarah.kompasiana.com/2011/01/07/sejarah-majalah-tempo-konflik-dan-pembredelan/>.
 Diakses pada 12 Desember 2023.
- <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/07/08/brk,20100708261998,id.ml>. Diakses pada 12 Desember 2023.